

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Penelitian	11
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	15
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
PEMAKNAAN <i>ILLICIT ENRICHMENT</i> DALAM UNCAC.....	17
2.1 Pemaknaan Illicit Enrichment Dalam UNCAC	17
2.1.1 <i>Person of Interest</i>	21
2.1.2 <i>Period of Interest</i>	24

2.1.3 <i>Significant Increase in Assets</i>	25
2.1.4 <i>Intent</i>	27
2.1.5 <i>Absents of Justification</i>	30
2.2 Pemaknaan <i>Illicit Enrichment</i> di Negara Lain	35
2.2.1 China.....	36
2.2.2 Argentina	38
2.2.3 Vietnam.....	39
2.2.4 Perancis.....	40
2.2.5 Belanda	42
2.2.6 Australia.....	43
BAB III.....	45
URGENSI PENGATURAN <i>ILLICIT ENRICHMENT</i> DI INDONESIA.....	45
3.1 Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	45
3.2 Pro dan Kontra Penerapan Aturan <i>Illicit Enrichment</i>	50
3.3 Urgensi Pengaturan Delik <i>Illicit Enrichment</i>	56
3.4 Pelaporan Harta Kekayaan	65
3.4.1 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	66
3.4.2 Laporan Pajak	71
3.4.3 Pemeriksaan Gaya Hidup (<i>Lifestyle</i>)	73
BAB IV	76
PENUTUP.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	77
DAFTAR BACAAN.....	79

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)